

TELAAHAN PENGGUNAAN PENDEKATAN SEKOLAH LAPANG DALAM PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT) PADI : Kasus di Kabupaten Blitar dan Kediri, Jawa Timur

Assesment on Field School Approach in Rice Integrated Crop Management (PTT): A Case Study in Blitar and Kediri Regencies, East Java

Erizal Jamal

*Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jl. Tentara Pelajar 10 Bogor*

ABSTRACT

Integrated Crops Management (PTT) approach for rice crop is systematic measures to improve farmers' ability to understanding rice farm business problems they are dealing with and developing possible opportunities. Besides local knowledge is the key to understanding innovation technology introduction, another important element is how to learn systematic decision making based on common experiences on the selected farm lands. Field school is deemed to be the best approach to accelerating farmers' understanding and adoption process. Effective field school could be achieved through regular common activities in the farmers' farm land. In a small group, the farmers could involve in all activities during one crop season using the specific location curriculum and intensive field workers' assistance. This paper describes SLPTT (PTT Field Schools) in Sido Warek and Watu Gede Villages, Kediri Regency and Plumbangan Village, Blitar Regency, East Java Province. In general, SLPTT implementation is not fully supported by the basic requirements such that the farmers are lack of innovation understanding and adoption. Assisting field workers are limited and learning process among the farmers is not well carried out. It needs synergy of various programs to maximize learning process.

Key words : *rice, ICM, innovation*

ABSTRAK

Pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) untuk tanaman padi merupakan upaya sistematis yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petani terhadap masalah yang dihadapinya dalam usahatani padi serta identifikasi peluang pengembangan yang mungkin dilakukan. Pada pendekatan ini dipersyaratkan adanya pemahaman petani terhadap komponen inovasi yang diintroduksi dengan memperhatikan *local knowledge* yang ada, dan proses pembelajaran pengambilan keputusan secara sistematis berdasarkan pengalaman kegiatan bersama di lahan terpilih. Penggunaan sekolah lapang dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk percepatan pemahaman petani serta proses adopsi itu sendiri. Sementara itu agar pendekatan sekolah lapang dapat efektif, diperlukan beberapa syarat keharusan yang antara lain terkait dengan adanya kegiatan bersama di lahan petani secara reguler. Dengan jumlah petani yang terbatas, petani dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama semusim dengan kurikulum yang berbasis kondisi spesifik lokasi dan pendampingan yang intensif. Beranjak dari persyaratan di atas dicoba melihat

proses pelaksanaan di Desa Sido Warek dan Watu Gede, Kediri serta Desa Plumbangan, Blitar. Secara umum terlihat bahwa pelaksanaan SLPTT belum sepenuhnya didukung oleh berbagai syarat keharusan yang ada bagi terlaksananya sekolah lapang yang baik, sehingga pemahaman petani dan adopsi belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Ketersediaan tenaga pendamping masih merupakan faktor utama bagi keberhasilan pendekatan ini. Sementara itu, proses penciptaan suasana belajar diantara petani sendiri belum dapat berjalan dengan baik. Diperlukan sinergi berbagai program yang ada, sehingga kegiatan belajar dalam kelompok dapat maksimal dilakukan.

Kata kunci : *padi, PTT, inovasi*

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatan petani tanaman pangan terutama padi, diperlukan dukungan inovasi teknologi dan inovasi kelembagaan. Ditinjau dari potensi sumberdaya yang dimiliki, Indonesia sebenarnya mampu berswasembada beras dan bahkan mampu pula menjadi pemasok di pasar dunia. Untuk mewujudkan itu diperlukan berbagai dukungan, baik teknologi dan investasi maupun kebijakan. Keberhasilan upaya peningkatan produktivitas, produksi dan pendapatan petani sangat bergantung pada kemampuan penyediaan dan penerapan teknologi produksi yang meliputi varietas unggul, benih berkualitas dan teknologi budidaya lainnya.

Sejak lima tahun terakhir Departemen Pertanian melakukan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dalam pengembangan tanaman padi. PTT merupakan upaya untuk meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani melalui penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi petani dan lingkungan setempat. Penerapan PTT berpedoman kepada pemahaman petani terhadap masalah yang dihadapi petani serta identifikasi peluang pengembangan yang mungkin dilakukan. Secara teknis ada enam komponen teknologi dasar (varietas, benih bermutu, bahan organik, pengaturan populasi tanam, pemupukan berdasarkan kebutuhan dan pengendalian OPT) dan enam komponen teknologi pilihan (pengolahan tanah sempurna, bibit muda, tanam 1-3 bibit per rumpun, pengairan secara efektif, penyiangan dengan landak serta panen tepat waktu) yang dianjurkan dalam pendekatan ini.

Dalam upaya percepatan adopsi pendekatan PTT padi ini, sejak dua tahun terakhir Departemen Pertanian telah mencanangkan upaya pemasalannya melalui pendekatan sekolah lapang PTT atau SLPTT. Secara berjenjang pelaksanaan kegiatan ini dikoordinasikan langsung oleh Ditjen Tanaman Pangan, dan untuk tahun 2009 ini ditargetkan pelaksanaan kegiatan ini di 80.000 kelompok di seluruh Indonesia. Belajar dari keberhasilan pelaksanaan sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT), maka diharapkan melalui pendekatan sekolah lapang ini, terjadi proses pembelajaran di tingkat petani dan antar petani.

Pertanyaannya sekarang apakah pendekatan sekolah lapang memang cocok digunakan untuk diseminasi inovasi PTT padi, dan seberapa jauh penggunaan pendekatan ini berpengaruh terhadap upaya percepatan adopsi di tingkat petani. Hal lain yang menarik untuk ditelaah adalah agar pendekatan sekolah lapang ini dapat lebih efektif dalam proses percepatan diseminasi inovasi PTT padi kepada petani, hal apa yang perlu dipenuhi sebagai syarat keharusan dan kecukupan dari sebuah pendekatan, dengan belajar dari pendekatan sekolah lapang yang telah diterapkan sebelumnya.

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian tentang karakteristik inovasi teknologi dan kelembagaan dalam percepatan adopsi teknologi, yang dilaksanakan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) tahun 2009. Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang sistem dan mekanisme pendekatan sekolah lapang dalam proses diseminasi inovasi PTT Padi, yang dikaitkan dengan karakter inovasi itu sendiri, dalam proses percepatan diseminasi inovasi di tingkat petani. Diharapkan melalui penulisan makalah ini dapat dihasilkan beberapa saran rekomendasi untuk memperbaiki dan mengefektifkan sistem diseminasi inovasi padi, terutama yang terkait dengan PTT dan SLPTT.

Penulisan makalah ini didasari hasil penelusuran data sekunder dari penghasil inovasi serta hasil studi tentang efektivitas pendekatan sekolah lapang pada berbagai program terdahulu. Data primer didapat melalui pengumpulan data lapang di wilayah terpilih di Jawa Timur. Pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan panduan kuesioner sederhana digunakan untuk menggali data dari berbagai sumber, di lokasi terpilih di Kabupaten Blitar dan Kediri.

ASUMSI DAN PRINSIP DASAR SEKOLAH LAPANG : BELAJAR DARI SLPHT

Beranjak dari pelaksanaan Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), maka asumsi yang mendasari dilakukan pendekatan sekolah lapang adalah sebagai berikut (FAO, 1996) :

1. Pengendalian hama terpadu (PHT) bukanlah suatu paket teknologi, tetapi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berkembang dengan berjalannya waktu, serta berorientasi pada hal-hal yang ramah lingkungan dan peningkatan kemampuan petani melakukan observasi.
2. Kegiatan lapangan adalah guru terbaik bagi petani
3. Kegiatan ini merupakan pelatihan sepanjang musim yang memungkinkan petani melakukan pengamatan dengan baik.
4. Petani dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai pengalaman dan mengambil keputusan.

5. "Local knowledge" akan memandu petani dalam pengambilan keputusan.
6. Pelatih bukan guru, tetapi adalah pendamping dalam membuat keputusan.
7. Petani punya kemampuan dan kemauan untuk membagi pengetahuannya dengan petani lainnya.

Dengan asumsi di atas dikembangkanlah kegiatan SLPHT di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Kegiatan ini menggunakan sawah selama satu musim tanam sebagai sarana dan tempat belajar utama bagi petani untuk mengelola ekosistem pertanian secara berkelanjutan. Cara belajar lewat pengalaman oleh petani dengan melakukan pengamatan agroekosistem, mengungkapkan dan menganalisis hasil pengamatan, menyimpulkan dan menerapkan teknologi dengan metode serta bahan yang praktis dan sesuai dengan kondisi ekosistem petani.

Selama satu musim tanam petani bersama kelompoknya belajar sendiri dan memutuskan sendiri teknologi pertanian yang paling tepat yang bisa mereka lakukan sehingga mereka tidak tergantung pada orang-orang atau pihak-pihak lain. Mengamati, menghitung, mengukur, membandingkan, menganalisis, membuat hipotesis serta mengambil kesimpulan atas dasar penalaran ilmiah, merupakan kegiatan yang mereka lakukan pada setiap hari pertemuan. Bila petani ingin mendalami topik-topik khusus yang ingin mereka ketahui, mereka dilatih melakukan berbagai bentuk pengujian dan percobaan yang mereka rancang dan amati bersama. Hasil pengujian dan percobaan tersebut menghasilkan beberapa teknologi yang menurut keyakinan mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi (Untung, 2007). Sedangkan metoda berlatih melatih yang dipakai adalah mengacu pada prinsip-prinsip berlatih melatih orang dewasa (andragogi) dengan siklus berlatih melatih melalui pengalaman (*Experience Learning Cycle/ELC*).

Selain penguasaan kemampuan PHT, peserta juga mendapatkan kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, kerjasama, dinamika kelompok, pengembangan bahan berlatih melatih serta komunikasi yang efektif yang dimaksudkan agar petani dapat menjadi fasilitator sehingga dapat membantu dan menjadi pemandu bagi petani lainnya. Peran sebagai petani pemandu dalam hal ini sangat penting ketika petani telah selesai mengikuti SLPHT yang secara mandiri kemudian memasuki tahapan tindak lanjut dari pelaksanaan SLPHT yaitu menyebarluaskan hasil-hasil SLPHT kepada petani lainnya. Kekhasan ataupun kekuatan lainnya dari SLPHT adalah dalam setiap kali pertemuan senantiasa dilakukan kegiatan *pengkajian terhadap setiap unsur agroekosistem* secara sistematis dan mendalam. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa perubahan agroekosistem berbeda untuk setiap minggunya. Hasil kajian mingguan selanjutnya disusun secara utuh untuk menentukan kesimpulan dan menetapkan tindakan yang harus dilaksanakan. Demikian pula dengan *penyediaan sarana/prasarana berlatih melatih yang praktis dan tepat guna*, merupakan kekhasan ataupun kekuatan lainnya dari pelaksanaan SLPHT. Setiap kegiatan

SLPHT, penyediaan sarana/prasarana berlatih melatih dirancang bersama agar dapat diterapkan secara langsung oleh para petani (Chalifah, 2007).

Melalui pendekatan ini Untung (2007) mengklaim ada sekitar satu juta petani alumni SLPHT di Indonesia. Untuk lokasi Daerah Istimewa Yogyakarta saja telah dilakukan kegiatan SLPHT di 1641 kelompok tani atau mencakup sekitar 41.025 orang petani yang telah dilatih (Chalifah, 2007). Secara umum jumlah ini baru mencakup sekitar 5 persen dari total petani yang ada.

Kontroversi tentang keberhasilan kegiatan SLPHT di Indonesia dapat diikuti dari perdebatan berbagai kalangan mulai dari Feder *et al.*, 2004a dan 2004b, serta Kuswara (1998), Oka (1991), Nikmatullah (2005) yang pada intinya memperlihatkan adanya persoalan keberlanjutan adopsi dari inovasi ini serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan petani. Dari kajian yang dilakukan Oka (1991) dan Kuswara (1998) pada data spot di beberapa lokasi, terlihat bahwa SLPHT berhasil menekan biaya produksi sebesar 11 persen dan mengurangi penggunaan pestisida hampir separohnya. Namun kajian jangka panjang yang dilakukan Feder *et al.* (2004a; 2004b) terlihat bahwa pelaksanaan SLPHT di Indonesia tidak memberikan pengaruh nyata kepada petani alumni SLPHT dan non-alumni SLPHT dalam hal pengurangan jumlah penggunaan pestisida serta peningkatan hasil padinya. Menurut Marijono (2007 dan 2008) serta Resosudarmo dan Yamazaki (2005) perbedaan hasil antara kedua pengamatan di atas disebabkan jangka waktu pengamatan, dimana Kuswara (1998) dan Oka (1991) melakukan pengamatan tidak lama setelah kegiatan SLPHT dan para alumni masih konsisten dengan apa yang dipelajarinya selama kegiatan pelatihan. Sementara Feder *et al.* (2004d; 2004b) melakukan pengamatan sampai beberapa tahun setelah pelatihan dilakukan, dan banyak dari alumni yang kembali berperilaku seperti sebelum pelatihan dalam penggunaan pestisida di lahannya, karena berbagai alasan.

Terlepas dari berbagai kontroversi di atas, secara kasat mata dapat diamati dipedesaan bahwa dampak dari kegiatan SLPHT tidaklah sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini (Resosudarmo dan Yamazaki, 2005) :

1. Peserta yang dapat mengikuti kegiatan ini hanya sekitar 5 persen dari seluruh petani dan dengan kompleksitas permasalahan yang ada, petani tidak sepenuhnya mampu menularkan ilmunya pada petani lainnya, sehingga secara keseluruhan dampaknya tidak seperti yang diharapkan.
2. Banyak petani yang mengikuti kegiatan ini adalah petani kecil atau *part time farmer*, dimana waktunya banyak dicurahkan untuk mencari penghasilan tambahan di luar kegiatan usahatani di sawah. Para petani ini tidak dapat mengikuti kegiatan belajar secara penuh dalam satu musim sehingga pemahaman terhadap masalah yang ada menjadi minor.
3. Banyak petani yang telah mengikuti kegiatan SLPHT karena kurangnya bimbingan dan pendampingan, serta merasakan rumitnya harus

melakukan pengamatan dulu ketimbang langsung menggunakan pestisida, banyak yang kembali menggunakan pestisida tanpa ada pengamatan. Kondisi ini diperburuk oleh intensifnya promosi dari produser pestisida langsung ke lahan petani.

4. Secara keseluruhan petani kurang merasakan manfaat langsung dari metoda pembelajaran ini, pengurangan ongkos pestisida tidak seimbang dengan waktu yang mereka korbankan untuk melakukan pengamatan.
5. Tidak ada kegiatan lanjutan yang dapat terus membantu pendampingan petani sehingga keberlanjutan penerapan PHT di tingkat petani rendah.

Terkait dengan point terakhir, Resosudarmo dan Yamazaki (2005) membuat perbandingan antara pelaksanaan BIMAS dan SLPHT, dan kesimpulannya pendekatan BIMAS lebih baik karena ada kontinuitas setelah program BIMAS yaitu INMAS dan INSUS, dan petani tetap dapat pembimbingan yang intensif. Sementara pada SLPHT tidak ada program sejenis setelah 10 tahun pelaksanaannya.

Beranjak dari berbagai analisis di atas terlihat bahwa pendekatan sekolah lapang menuntut suatu perencanaan kegiatan yang baik, terutama terkait dengan kurikulum dan pemilihan petani peserta. Kurikulum sedapat mungkin disesuaikan dengan kebutuhan spesifik petani dan ada keterikatan bersama untuk mengetahui masalah tersebut. Sementara itu petani peserta merupakan petani yang diharapkan dapat menularkan ilmunya kepada petani lainnya, serta dapat mengikuti kegiatan kelompok secara penuh. Terkait dengan SLPTT, ini bukan suatu hal yang baru bagi petani, karena mereka sudah mendapat pengetahuan sebelumnya dari BIMAS, INMAS dan INSUS, sehingga proses pembelajaran seharusnya tidak serumit SLPHT. Yang perlu mendapat perhatian adalah masalah kontinuitas pendampingan bagi petani, karena beranjak dari pengalaman SLPHT masalah kontinuitas pendampingan ini banyak berpengaruh terhadap keberlanjutan adopsi di tingkat petani. Selain itu ketersediaan berbagai sarana pendukung selama proses pembelajaran merupakan hal lain yang menjadi kunci keberhasilan kegiatan.

Berdasarkan karakteristik dari pendekatan SLPTT secara keseluruhan, maka diperlukan syarat keharusan bagi terlaksananya dengan baik SLPTT yaitu :

1. Kegiatan ini merupakan proses pembelajaran yang membuka kesempatan petani untuk melakukan pilihan.
2. Adanya kegiatan bersama dilahan petani secara reguler dengan jumlah petani yang terbatas.
3. Petani dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama semusim.
4. Adanya kurikulum yang berbasis pada kondisi spesifik lokasi.
5. Adanya pendampingan yang intensif.

Sementara agar kegiatan ini berkelanjutan diperlukan syarat kecukupan, yang meliputi :

1. Dukungan dari berbagai pihak terkait di daerah sehingga dampak kegiatan ini dalam peningkatan produksi dan pendapatan dirasakan petani.
2. Merupakan suatu program yang berkelanjutan.

Analisis terhadap pelaksanaan sekolah lapang PTT padi, terkait dengan karakteristik di atas, akan difokuskan pada syarat keharusan dan kecukupan di atas.

PEMAHAMAN PENGKAJI BPTP TERHADAP PTT DAN SLPTT

Secara Umum para pengkaji yang ada di BPTP Jawa Timur telah memahami dengan baik konsep PTT dan SLPTT. Menurut kepala BPTP Jatim berbagai penyesuaian terhadap konsep yang ada terus dilakukan, dan untuk Jawa Timur dibuat panduan pengelolaan tanaman padi sawah secara terpadu berdasarkan perwilayahan dengan karakteristik yang hampir sama. Ada empat wilayah (Badan Koordinasi Wilayah) yang mempunyai buku panduan tersendiri, yaitu : Bakorwil Bojonegoro (Kab. Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Jombang, Mojokerto dan Kediri) Malang (Kab Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi), Madiun (Kab Madiun, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan) dan Madura (Kabupaten yang ada di Pulau Madura). Secara umum pada ke empat buku ini isinya relatif sama dan yang membedakan adalah informasi tentang rekomendasi pemupukan spesifik lokasi per-kecamatan. *(Ini mendukung syarat keharusan ke empat tersedianya bahan yang spesifik lokasi)*. Namun bahan-bahan ini belum mampu diterjemahkan oleh para penyuluh yang ada di lokasi yang didatangi untuk mendukung penyediaan materi/kurikulum yang berbasis kondisi spesifik lokasi. *Diperlukan kesepakatan yang jelas pada level mana ketersediaan materi spesifik lokasi ini ditekankan, apa pada level kabupaten, kecamatan atau desa.*

Sudah baiknya pemahaman para pengkaji yang ada di BPTP terhadap konsep PTT dan SLPTT terlihat dari ketersediaan berbagai bahan diseminasi yang terkait dengan PTT dan SLPTT tersebut, baik itu berupa leaflet, bahan *power point* dan lainnya yang lebih komunikatif namun tetap sesuai dengan konsep awal yang ada. Menurut para pengkaji, *konsep SLPTT sangat ideal karena dengan adanya kebebasan memilih bagi petani, maka mereka terhindar dari berbagai kerugian, sebagai contoh untuk lokasi Kabupaten Jember dan Lumajang, akan berbahaya bila dipaksakan petaninya memilih bibit muda, karena adanya serangan hama keong di kedua wilayah ini (syarat keharusan pertama sudah terpenuhi).*

Menurut Kepala BPTP Jatim kunci keberhasilan dari pelaksanaan SLPTT adalah masalah komunikasi, baik itu internal BPTP ataupun BPTP dengan pihak luar. Komunikasi di internal untuk membuat pemahaman yang sama tentang SLPTT. Selanjutnya mereka ini harus dibekali dengan bahan penunjang dalam berbagai bentuk serta kemampuan komunikasi yang baik dengan para pihak di luar BPTP.

Terkait dengan pelaksanaan SLPTT ini beberapa persoalan yang terungkap pada tingkat BPTP antara lain, ***ketersediaan tenaga untuk melakukan pendampingan sangat terbatas***, sementara itu mekanisme pelibatan penyuluh sampai ketingkat kecamatan tidak berjalan dengan baik. Pelaksanaan pelatihan tingkat nasional (PL1), pelatihan tingkat provinsi (PL2) dan pelatihan tingkat kabupaten (PL3) tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. PL1 yang melibatkan BPTP dan aparat terkait di tingkat propinsi dengan pelatihan di Sukamandi, telah terselenggara dengan baik dan PL2 di tingkat propinsi, yang diselenggarakan BPTP bersama dinas terkait juga dapat terselenggara dengan baik, namun PL3 yang harusnya dilaksanakan oleh daerah tingkat II, tidak dapat dilakukan karena ketiadaan anggaran untuk melaksanakannya. Hal ini berakibat pemahaman para pihak mulai dari tingkat kabupaten ke bawah mungkin akan beragam. (***Syarat keharusan ke lima kurang terpenuhi***)

Masalah lainnya adalah koordinasi antara dinas teknis dan lembaga yang menangani penyuluhan di daerah, utamanya kabupaten. Kegiatan SLPTT merupakan program dinas teknis dan semua pembiayaan ada pada Dinas, sementara itu untuk pendampingan, diharapkan dilakukan oleh penyuluh yang ada di badan penyuluhan kabupaten. Lembaga penyuluhan ini tidak mendapatkan dana khusus bagi pendampingan SLPTT, dan itu sering menjadi persoalan di lapang. (***Syarat keharusan ke lima kurang terpenuhi***). Kurangnya pendampingan dari penyuluh dikuatirkan akan mempersulit pemahaman petani tentang konsep PTT dan pilihan yang dapat dilakukan berdasarkan kondisi karakteristik wilayah.

Persoalan lainnya adalah terlambatnya proses pencairan dana bagi kegiatan laboratorium lapang (LL), sehingga kegiatan ini terkadang dilakukan belakangan dari pelaksanaan Sekolah lapangnya (SL) sendiri. Idealnya LL dilakukan bersamaan dengan SL, sehingga petani dapat melakukan pembelajaran bersamaan dengan penerapan PTT di lahannya sendiri. Kondisi ini menyebabkan kegiatan bersama di lahan yang dijadikan percontohan tidak dapat terlaksana dengan baik. Selain itu LL direncanakan pada lahan seluas satu hektar, sementara itu SL nya sendiri meliputi lahan lainnya disekitarnya seluas 24 hektar. Dengan pendekatan ini maka untuk kegiatan kelompok akan mencakup jumlah petani yang banyak, dengan asumsi luas lahan petani berkisar 0,25 – 0,50 hektar, maka pada setiap hamparan 24 hentar akan mencakup antara 50 – 100 orang petani, jumlah ini kurang ideal untuk suatu sekolah lapang yang baik. (***Syarat keharusan kedua kurang terpenuhi***)

PEMAHAMAN PETUGAS LAPANG DAN PETANI

Apa yang disinyalir oleh para pengkaji BPTP ditemukan pada beberapa lokasi yang didatangi selama pengkajian ini, dari penyuluh yang diwawancarai, satu penyuluh secara terus terang menyatakan tidak paham dengan konsep SLPTT, karena malas membaca buku panduan yang ada, yang menurutnya tidak mudah dicerna. Penyuluh tersebut telah dua kali mengikuti sosialisasi SLPTT, namun karena hanya dalam kegiatan kelas dan tidak ada prakteknya, yang bersangkutan merasa tidak yakin kalau harus mendampingi petani. Satu penyuluh lainnya sudah dapat menerangkan konsep SLPTT dengan baik dan menerangkan bagaimana semua konsep itu diterapkan bersama petani. Namun yang bersangkutan mengeluh sulit meyakinkan petani karena tidak ada pola paket seperti dulu dan terbatasnya bantuan yang tersedia bagi petani. Menurut yang bersangkutan kalau mau berhasil petani harusnya dibantu secara lengkap seperti untuk LL. Kesan umum yang ditangkap dari petugas lapang ini adalah rendahnya motivasi mereka dalam pelaksanaan sosialisasi SLPTT, dan penguasaan materi kurang baik karena minimnya pengalaman praktis (*kurang mendukung syarat keharusan kelima*).

Petani yang didatangi merupakan lokasi Prima Tani, dan mereka sangat antusias dengan beragam kegiatan BPTP. Pemahaman para petani terhadap SLPTT relatif sangat baik dua responden yang diwawancarai di Plumbangan, Doko, Blitar dapat dengan gamblang menerangkan konsep SLPTT sesuai dengan buku panduan yang ada. Bahkan, satu responden dengan baik menerangkan manfaat pertanaman legowo yang terkait dengan pemanfaatan matahari dan kemudahan pemeliharaan. Kedua petani ini dapat menerangkan bahwa mereka telah memanfaatkan pupuk organik, penggunaan benih hibrida unggul, tanam legowo, pengendalian hama terpadu serta penggunaan benih muda. Mereka mendapatkan informasi langsung dari petugas BPTP yang sering datang ke desa tersebut.

Keadaan sebaliknya ditemui di desa Watu Gede, Puncu Kediri, tidak ada petani yang memahami apa itu SLPTT. Satu petani yang diwawancarai sudah mendengar SLPTT dan akan ada kegiatan tersebut di lokasi mereka tahun ini. Lokasi desa ini dengan irigasi non-teknis nampaknya bukan prioritas program SLPTT. Dari gambaran di atas terlihat bahwa pemahaman petani masih sangat beragam dan untuk inovasi yang berupa paket serta adanya kebebasan petani untuk diminta memilih, maka pendekatan sosialisasi harus dengan multi pendekatan dan berulang, serta dengan kegiatan praktek bersama yang lebih sering. Menurut salah satu responden di Blitar, dengan LL petani dapat melihat langsung dan bisa memilih seperti yang diinginkannya, dan faktor pendampingan yang intensif sangat besar pengaruhnya terhadap proses adopsi.

Para petani umumnya menyatakan dapat mengikuti kegiatan kelompok, bila itu telah terencana jauh-jauh hari, sehingga mereka dapat mengatur kegiatan mereka di luar kegiatan pertanian. Kesan yang didapat dari petani yang

diwawancarai, kurang terlihat antusiasme bagi suatu kegiatan kelompok yang sistematis dan terencana dengan baik. Selain itu, selama ini kegiatan kelompok lebih merupakan kegiatan dadakan, tergantung ketersediaan waktu tenaga lapang, dan itu menyulitkan kontinuitas kehadiran mereka. Petani yang tergabung dalam kelompok tani, yang jumlahnya rata-rata 25 orang umumnya tergabung dalam kelompok tani yang berbasis pemukiman (per dusun) dan bukan hamparan seperti yang ada dalam konsep SLPTT, ini tentu menyulitkan juga dalam pelaksanaan kegiatan di lapang. *(kurang mendukung syarat keharusan kedua dan ketiga dari SLPTT)*

SUMBER INFORMASI UTAMA PETANI TENTANG SLPTT

Petugas pendamping, baik dari BPTP dan penyuluh, masih menjadi sumber utama informasi tentang SLPTT di lokasi yang didatangi. Informasi awal tentang konsep ini didapat dari berbagai sumber, baik itu media audio visual ataupun media massa. Pendalaman pemahaman, diperoleh setelah berinteraksi secara lebih intensif dengan penyuluh dan pendamping (Prima Tani). Dari 5 petani padi yang diwawancarai, 4 orang menyatakan bahwa dari informasi awal yang didapat belum paham apa-apa dan menganggap SLPTT sama dengan program seperti INSUS dulu. Hanya satu petani yang menyatakan sudah paham perbedaan konsep SLPTT dengan konsep yang ada sebelumnya. Tiga petani menyatakan bahwa pemahaman dia tentang SLPTT semakin baik setelah berinteraksi secara intensif dengan petani lain yang menerapkan konsep ini.

Secara umum tidak ada benturan dengan aspek sosio budaya masyarakat lokal dengan semua komponen inovasi dalam SLPTT di lokasi yang didatangi, terutama yang terkait dengan varietas unggul, benih bermutu, pemupukan sesuai kebutuhan tanaman serta penggunaan bibit muda dan pengendalian OPT/ Pengolahan tanah. Hal yang tidak sepenuhnya didukung oleh sosio budaya lokal, terkait dengan penggunaan bahan organik, pengaturan populasi tanam, penggunaan bibit 1-3 per rumpun, penggunaan landak untuk penyiangan serta pengairan secara efektif dan efisien.

Penggunaan bahan organik, karena dalam budaya masyarakat yang ada belum terbiasa memanfaatkan kotoran ternak yang ada, baik yang berasal dari sapi atau kotoran lainnya, menyebabkan kegiatan penggunaan kotoran ternak bagi pupuk organik masih merupakan hal asing bagi petani. Terkait dengan pengaturan populasi tanam dan penggunaan bibit 1-3 per rumpun, terkendala oleh kebiasaan buruh tani yang ada di lokasi pengkajian. Buruh tani merasa direpotkan bila harus mengatur tanam dengan pola tanam legowo dan menanam benih 1-3 bibit per rumpun. Penggunaan landak masih menjadi pilihan terakhir, karena banyak petani yang menggunakan herbisida.

Komponen inovasi yang banyak diadopsi oleh petani adalah benih bermutu dan varietas unggul serta penggunaan pupuk berdasarkan kebutuhan dan

pengendalian OPT. Alasan utama yang terkait dengan benih dan varietas, karena dapat diamati langsung dampaknya serta mudah diaplikasikan. Selain itu inovasi ini dianggap menguntungkan karena dapat meningkatkan produksi, dalam aplikasinya tidak diperlukan pendampingan yang intensif.

Terkait dengan pemilihan varietas, faktor rasa nasi serta harga jual yang baik, menjadi alasan utama pemilihan varietas. Faktor produktivitas dan ketersediaan benih di lokasi petani menjadi alasan kedua dan ketiga dalam pemilihan varietas. Faktor harga benih dan ketahanan penyakit merupakan alasan terakhir dalam memilih varietas yang ditanam.

FAKTOR KELEMBAGAAN YANG MEMPENGARUHI ADOPSI

Banyak faktor dari aspek kelembagaan yang mempengaruhi proses pengenalan dan adopsi komponen inovasi dalam PTT atau PTT secara keseluruhan. Dalam proses pengenalan inovasi PTT padi, keberadaan kelompok tani dan penyuluh masih menjadi faktor dominan bagi proses pengenalan awal petani bagi konsep PTT. Pada lokasi Prima Tani terlihat bahwa pendampingan yang intensif oleh tenaga detasir yang ada mempercepat pengenalan petani tentang SLPTT serta proses adopsinya. Kebersamaan petani dalam kelompok tani, yang membantu proses pengadaan benih, varietas serta pupuk, berpengaruh nyata terhadap proses adopsi komponen inovasi dalam PTT padi. Demikian juga kelembagaan yang memungkinkan petani dalam penyediaan dana untuk pengadaan bahan pendukung bagi pelaksanaan inovasi, berpengaruh nyata terhadap proses adopsi komponen inovasi dan PTT secara keseluruhan.

Pengkajian ini memerlukan pendalaman yang lebih jauh untuk melihat dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, sehingga dampak dari peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan dapat dirasakan langsung oleh petani yang menerapkan pendekatan ini. Selain itu jaminan keberlanjutan dalam penggunaan pendekatan ini, sehingga petani dapat terus terlatih dan terbiasa melaksanakan berbagai pengamatan, membuat perbandingan, berbagi pengalaman serta memutuskan sesuatu yang terbaik bagi dirinya secara individu dan berkelompok dapat terus dikembangkan secara sistematis.

PENUTUP

Secara konsep karakteristik komponen inovasi yang ditawarkan dalam pendekatan SLPTT memerlukan pemahaman yang baik oleh petani, agar mereka dapat melakukan pilihan, beranjak dari *local knowledge* yang dimilikinya. Secara intristik setiap komponen inovasi, baik itu inovasi dasar ataupun pilihan, memiliki karakteristik yang khas dan mempengaruhi proses dan kecepatan adopsi di tingkat

petani. Teknologi dasar yang terkait dengan varietas unggul dan benih bermutu merupakan komponen inovasi yang mudah dipahami petani dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh petani, sehingga secara parsial komponen ini paling banyak diadopsi petani. Sementara itu yang terkait dengan bahan organik, pengaturan populasi tanam, pemupukan berdasarkan kebutuhan serta pengendalian OPT memerlukan upaya khusus dalam proses pengenalan dan adopsi petani. Pendekatan sekolah lapang, paling tepat digunakan dalam pengenalan berbagai komponen di atas, apalagi bila dikaitkan dengan pengaruh antara satu komponen inovasi terhadap komponen inovasi lainnya.

Bila dilihat dari sisi konsep dan asumsi yang mendasari pendekatan sekolah lapang, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan SLPTT. Dalam perencanaan kegiatan, ketersediaan kurikulum yang baik yang mencerminkan panduan pendekatan yang ada dengan *local knowledge* merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Peningkatan kapasitas penyuluh yang ada agar dapat melakukan berbagai modifikasi terhadap pendekatan yang ada, merupakan langkah yang perlu terus diupayakan. Program *Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information* (FEATI) yang mendukung terjadinya proses pembelajaran di tingkat petani, dalam tataran terbatas dapat disinergikan dengan program SLPTT, demikian juga program lainnya. Hal ini juga untuk mendukung aktivitas kelompok yang lumintu dan didukung oleh berbagai program yang masuk ke wilayah pedesaan.

Kesiapan petani untuk melakukan aktivitas secara kelompok dan berkelanjutan, juga hal khusus yang perlu untuk mendapat perhatian khusus, terlebih dengan semakin dominannya petani *part time farmers* di pedesaan Jawa saat ini. Demikian juga proses pengelompokan petani dalam kelompok yang dominan berdasarkan domisili, perlu dilihat sebagai tantangan agar tetap sejalan dengan konsep laboratorium lapang dan sekolah lapang yang menghendaki petani yang sama pada hamparan seluas 25 hektar.

Agar dapat dipahami dengan baik, maka proses pengenalan konsep dan pendekatan PTT melalui sekolah lapang perlu melalui pendekatan multi cara dan multi media. Proses pengenalan ini perlu didukung oleh suatu program yang terencana secara berkelanjutan, dan didukung berbagai program lain yang terkait. Secara nasional dan regional perlu dilihat proses sinergi dan saling dukung antar berbagai program yang ada, sehingga proses ini mendapat dukungan maksimal dari pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Chalifah, A. 2007. Penting dan Strateginya Upaya Peningkatan Kemampuan Petani di Provinsi DIY . Bina Program – Dinas Pertanian DIY. Yogyakarta.

- Feder, G., R. Murgai, and J. B. Quizon. 2004a. Sending Farmers Back to Schools: The Impact of Farmer Field School in Indonesia. *Review of Agricultural Economics*, Vol. 26, No. 1. Pp. 45-62.
- Feder, G., R. Murgai, and Quizon J. B. 2004b. The Acquisition and Diffusion of Knowledge: The Case of Pest Management Training in Farmer Field Schools, Indonesia. *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 55, No 2. Pp. 221-243.
- Food and Agriculture Organization's inter- country Rice Integrated pest management Programme for Asia.1996. Community-Based Rice IPM Programme Development : A Facilitator's Guide. First Edition-1996.
- Kuswara, E. 1998. IPM in Marga Sub-District, Tabanan District, Bali. In Community IPM: Six Cases from Indonesia. Semi-Annual FAO IPM Technical. Assistance Progress Report, Jakarta, Indonesia, pp. 100-137.
- Mariyono, J. 2007. Adoption and Diffusion of Integrated Pest Management Technology: A Case of Irrigated Rice Farm in Jogjakarta Province, Indonesia Asia-Pacific Journal of Rural Development Vol. XVII, No. 1, July 2007.
- Mariyono, J. 2008. National Dissemination of Integrated Pest Management Technology through Farmers' Field Schools in Indonesia: Was It Successful? *Journal of Agricultural Technology* 4(1): 11-26.
- Nikmatullah, D. 2005. Efektivitas komunikasi kelompok pada sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) lada di UPT Bukit Kemuning Lampung Utara. *Jurnal Agrijati* 1 (1), Desember 2005.
- Oka, I. 1991. Success and Challenges of the Indonesian National Integrated Pest Management Program in the Rice-based Cropping System. *Crop Protection*, 10 (3): 163-65.
- Resosudarmo, B. P. and S. Yamazaki. 2005. Mass Guidance (BIMAS) vs Farmer Field School: The Indonesian Experience Indonesia Project Economics Division Research School of Pacific and Asian Studies. The Australian National University.
- Untung, K. 2007. Kontribusi SLPHT sains petani sebagai kontribusi SLPHT untuk pemberdayaan petani. Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Yogyakarta.